

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**Ade Amilia Alkiki
Nim 07011181520062**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Inderalaya, Ogan Ilir
Januari 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**ADE AMILIA ALKIKI
07011181520062**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2019

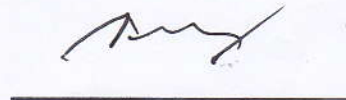
Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 24 Oktober 2019.

Inderalaya, 24 Oktober 2019

Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Anggota

2. Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Meski demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk diberikan kritikan maupun masukan terhadap tulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak kesulitan baik dalam proses pengumpulan bahan pustaka maupun dalam penyusunannya. Namun karena begitu banyak doa, motivasi, dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, segala hambatan yang ada dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan proposal hingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Utusan Allah yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Hartono dan Ibunda Suzarwati, serta adindaku tercinta Eca Dwi Ananda yang telah banyak memberikan bantuan, semangat serta motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas semua bantuannya selama penulis menempuh studi di Universitas Sriwijaya.

5. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas pelayanan yang diberikan selama ini.
6. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik beserta Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik untuk menorehkan tinta emas di almamater tercinta.
8. M. Sufi, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Prabumulih, Elman, ST selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih beserta Staf Pegawai yang telah memberikan keterangan serta memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis, untuk memberikan informasi dan data-data dalam penyusunan skripsi.
10. Semua keluargaku tanpa terkecuali, terimakasih atas segala bantuan dan suportnya serta dukungan doanya selama penulis dalam bangku kuliah.
11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini terimakasih atas semangat dan motivasinya.
12. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu bahan informasi pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Inderalaya, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Kebijakan Publik	9
C. Implementasi Kebijakan Publik	11
D. Model Teori Implementasi Kebijakan Publik	12
E. Teori Implementasi yang digunakan dalam penelitian	19
F. Rencana Tata Ruang Wilayah	20
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
H. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Informan Kunci	30

E. Jenis dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Kota Prabumulih	35
1. Sejarah Singkat Kota Prabumulih	35
2. Topografi	37
3. Hidrologi	38
4. Klimatologi	38
5. Penggunaan Lahan	39
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Prabumulih	40
1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih	40
2. Struktur Organisasi	42
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	43
4. Sumber Daya Manusia	47
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih	48
a. Komunikasi	48
b. Sumber Daya	55
c. Disposisi	64
d. Struktur Birokrasi	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih	3
Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Kota Prabumulih	5
Tabel 3. Luas Lahan Pertanian di Kota Prabumulih	5
Tabel 4. Jumlah Ijin Perubahan Penggunaan Lahan	6
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 6. Fokus Penelitian	29
Tabel 7. Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Prabumulih	36
Tabel 8. Misi dan Tujuan Renstra Dinas PUPR Kota Prabumulih	41
Tabel 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	47
Tabel 11. Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Pelatihan Penjenjangan	58
Tabel 12. Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	58
Tabel 13. Data Aset Dinas PUPR Kota Prabumulih	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Penggunaan Lahan (RTRW) Kota Prabumulih	4
Gambar 2 Model Teori George C. Edward	15
Gambar 3 Model Teori Merilee S. Grindle	16
Gambar 4 Model Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	17
Gambar 5 Model Teori Rippley dan Franklin	18
Gambar 6 Model Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir	19
Gambar 7 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 8 Halaman Depan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40
Gambar 9 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	43
Gambar 10 Workshop Implementasi Perda Bangunan Gedung dan Rapat Koordinasi Teknis	51
Gambar 11 Wawancara dengan Bapak Erwin Firmanza	54
Gambar 12 Wawancara dengan Bapak Aslimi	63
Gambar 13 Perwako Prabumulih tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	67
Gambar 14 Rapat Peningkatan Profesionalisme Kerja	70
Gambar 15 SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis Mendirikan Bangunan	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal	
Lampiran 2 Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi.....	
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Skripsi	
Lampiran 4 Lembar Revisi Ujian Komprehensif	
Lampiran 5 Surat Permohonan Penelitian	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 7 Pedoman Wawancara	
Lampiran 8 Matriks Hasil Wawancara	
Lampiran 9 Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih	
Lampiran 10 Perwako Prabumulih Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	
Lampiran 11 SOP Penerbitan Teknis Mendirikan Bangunan	

DAFTAR SINGKATAN

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
PUPR : Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perda : Peraturan Daerah
Perwako : Peraturan Walikota

ABSTRACT

The city of Prabumulih with high population growth, have relevance to the availability of space or land. The population continues to increase with a variety of activities demanding the government to take part in providing land or space. Prabumulih Regional Regulation Number 1 of 2014 was a step in the city of Prabumulih to respond to spatial issues in the city of Prabumulih. Various problems related to spatial planning in the city of Prabumulih lively occurred so that the purpose of this research is to explore what factors influence the implementation of the policy plan of spatial layout in the city Prabumulih. This study uses Qualitative descriptive methods. This method is used to further explore the sharp and accurate information related to the implementation of the spatial plan policy of Prabumulih City area. In this study acquired results that of the four factors implementing policy (communication, resources, disposition and bureaucratic structure) the biggest factor affecting the policy implementation of the spatial plan of the city of Prabumulih is Staff resource factors. Public Works office apparatus and City Room arrangement Prabumulih has not understood the function and position of spatial layout of the city of Prabumulih as a whole. Therefore, to implement a public policy it is necessary to professionalize the ability of the implementor so that the intent and objectives of the desired policy can be achieved optimally.

Keywords: Policy Implementation, Regional Spatial Planning

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



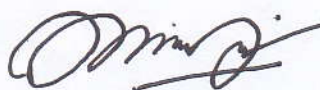
Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Inderalaya, September 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Kota Prabumulih dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, memiliki relevansi dengan ketersediaan ruang atau lahan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan beragam aktivitasnya menuntut pemerintah untuk turut menyediakan lahan atau ruang. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 merupakan langkah Kota Prabumulih untuk menyikapi masalah tata ruang di Kota Prabumulih. Berbagai permasalahan terkait penataan ruang di Kota Prabumulih marak terjadi sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk lebih menggali informasi yang tajam dan akurat terkait implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari keempat faktor implementasi kebijakan (komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi) faktor terbesar yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Prabumulih adalah faktor sumberdaya staff. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Prabumulih belum memahami fungsi dan posisi peruntukan tata ruang wilayah kota Prabumulih secara utuh. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik diperlukan kemampuan profesionalisasi dari para implementor agar maksud dan tujuan kebijakan yang diinginkan dapat dicapai secara optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Inderalaya, Mei 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional ialah pembangunan yang mengarah kepada manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup penduduk. Hal yang demikian bisa ditempuh dengan memenuhi keperluan dasar, salah satunya keperluan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup dan menerima lingkungan hidup yang sehat serta memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan”. Meningkatnya pertumbuhan penduduk tentu membutuhkan ketersediaan perumahan yang semakin banyak, terutama di kota-kota besar.

Perkembangan suatu kota dicirikan dengan perkembangan penduduknya. Perkembangan penduduk kota memberi pengaruh terhadap meluasnya kawasan terbangun dan tingginya kepadatan penduduk di sebagian komponen kota. Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh fungsi suatu kota karena mengalami peningkatan aktivitas sehingga menyebabkan peningkatan tuntutan ruang untuk lokasi sarana dan prasarana.

Kebijakan penggunaan lahan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam upaya mereformasi dan membatasi penggunaan lahan sehingga kita dapat mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Aturan praktis, instrumen kebijakan yang telah menjadi pilar dalam mengendalikan penggunaan lahan merupakan regulasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dijadikan sebagai petunjuk penataan kota, perencanaan tata ruang ditujukan untuk menyampaikan perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya lainnya. Perencanaan tata ruang yang dilaksanakan melalui progres dan prosedur pembentukan

serta penetapan rencana tata ruang. Perencanaan kota diatur rencana pemanfaatan ruang yang didalamnya dilengkapi proses pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak lain adalah mekanisme perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang tujuannya agar proses pembangunan yang ada di Kota Prabumulih terjadi sesuai dengan perencanaan. Rencana pemanfaatan ruang mengatur semua aspek bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya, pendidikan termasuk di dalamnya lahan pertanian.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih 2014-2034, kawasan peruntukan pertanian diatur dalam pasal 38 tentang kawasan budidaya dan diatur lebih lanjut pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa:

(1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian tanaman hortikultura; dan
- b. Kawasan pertanian tanaman perkebunan;

(2) Rencana kawasan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan tanaman nanas yang terdapat di :

- a. Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
- b. Kecamatan Prabumulih Selatan;
- c. Kecamatan Prabumulih Barat; dan
- d. Kecamatan Cambai.

(3) Rencana Kawasan pertanian tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan budidaya tanaman karet yang terdapat di :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| a. Kelurahan Karang Jaya; | m. Desa Tanjung Menang; |
| b. Kelurahan Sindur; | n. Desa Karang; |
| c. Kelurahan Cambai; | o. Desa Talang Batu; |
| d. Kelurahan Tanjung Rambang; | p. Desa Jungai; |
| e. Kelurahan Patih Galung; | q. Desa Karang Bindu; |
| f. Kelurahan Anak Petai; | r. Desa Rambang Senuling; |
| g. Kelurahan Gunung Kemala; | s. Desa Kemang Tanduk; |
| h. Kelurahan Payuputat; | t. Desa Sinar Rambang; |

- i. Kelurahan Sungai Medang;
- j. Kelurahan Sukaraja;
- k. Kelurahan Tanjung Raman;
- l. Desa Muara Sungai;
- u. Desa Karya Mulya;
- v. Desa Pangkul; dan
- w. Desa Tanjung Telang.

(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi :

- a. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian dari alih fungsi; dan
- b. Mengembangkan pusat koleksi dan pengolahan tahap awal di kawasan peruntukan pertanian.

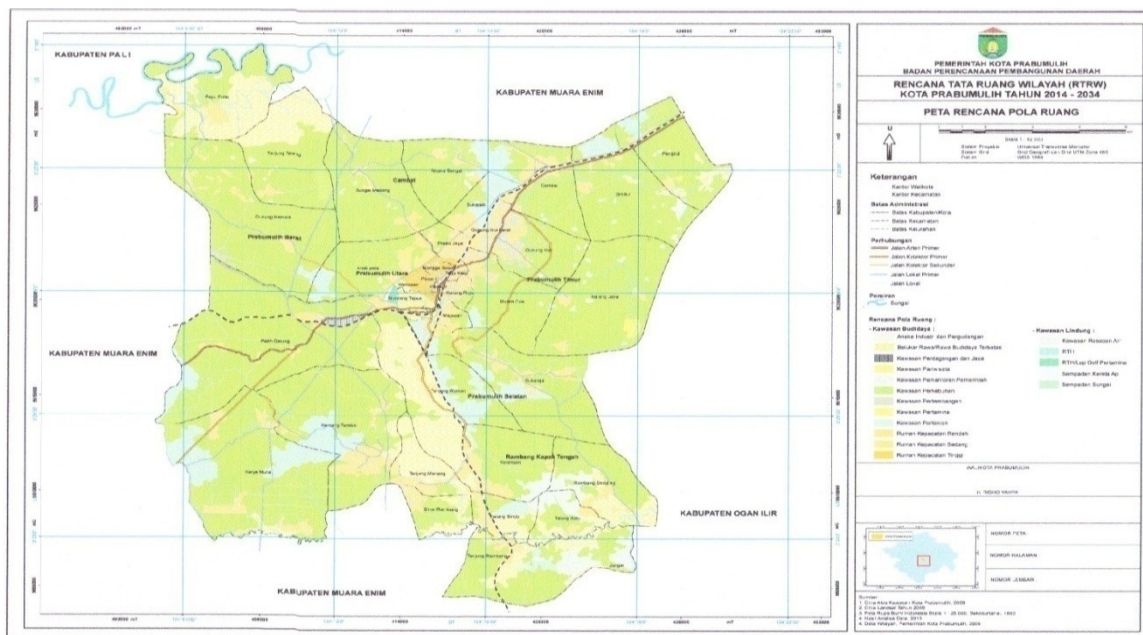
Kota Prabumulih adalah daerah baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 km² atau seluas 43.446 ha yang terdiri dari 6 Kecamatan, 25 Desa dan 12 Kelurahan. Berikut data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kota Prabumulih tahun 2010-2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih dalam angka 2018.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih Tahun 2010, 2016, dan 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2016	2017	2010-2016	2016-2017
1. Rambang Kapak Tengah	10 881	12 245	12 263	12,70	0,15
2. Prabumulih Timur	57 044	68 281	70 021	22,75	2,55
3. Prabumulih Selatan	17 014	18 616	18 708	9,96	0,49
4. Prabumulih Barat	29 569	30 501	30 805	4,18	1,00
5. Prabumulih Utara	31 524	32 410	32 761	3,92	1,09
6. Cambai	15 952	17 510	17 570	10,14	0,34
Jumlah	161 984	179 563	182 128	12,43	1,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih dalam Angka 2018

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih kepadatan penduduk Kota Prabumulih tiap tahunnya meningkat, pada tahun 2015 sebanyak 408 jiwa/km² hingga dengan tahun 2017 sebanyak 419 jiwa/km² dengan begitu penduduk Kota Prabumulih senantiasa mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan perkembangan daerah pemukiman dari tahun ke tahun kian meluas.



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan (RTRW) Kota Prabumulih

Berdasarkan peta penggunaan lahan Kota Prabumulih yang didapat dari RTRW Kota Prabumulih tahun 2014-2034 tersebut di atas, klasifikasi penggunaan lahan dibuat ke dalam beberapa kelas yaitu perkebunan karet, sawit, pertanian lahan kering campuran, perladangan, lahan terbuka, belukar rawa, tubuh air, permukiman, dan pertambangan. Penggunaan lahan di Kota Prabumulih didominasi oleh perkebunan dan lahan terbangun. Hubungan antara penggunaan lahan dengan kebutuhan hutan kota yaitu semakin banyak suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk lahan terbangun, maka semakin penting adanya hutan kota, begitu juga sebaliknya. Kelas karet rakyat memiliki luasan terbesar di dalam penggunaan lahan. Lengkapnya luas dan proporsi penggunaan lahan di Kota Prabumulih disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan di Kota Prabumulih Tahun 2014

N o	Penggunaan lahan	Luas area (ha)	Persentase (%)
1.	Belukar/Rawa	2 200,49	5,06
2.	Karet Rakyat	26 890,68	61,89
3.	Permukiman	5 322,27	12,25
4.	Perkebunan Sawit	2 039,39	4,69
5.	Perladangan/Tanah Terbuka	1 565,14	3,60
6.	Pertambangan	44,33	0,10

7.	Pertanian Lahan Kering Campuran	5 167,24	11,89
8.	Tubuh Air	216,47	0,49
	Total	43 446,00	100

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Prabumulih

Terkait dengan pertumbuhan penduduk erat hubungannya dengan salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari yakni tanah. Tanah yang produktif kian lama kian sempit, sementara yang memerlukan kian bertambah dan hal ini akan memberi pengaruh kepada hasil produktif pertanian, luas tanah, dan jumlah tenaga kerja. Masalah ini dianggap penting sebab dengan adanya penyusutan lahan tersebut akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan.

Seperti pada tabel 3 mengenai luas pertumbuhan penggunaan lahan pertanian di Kota Prabumulih pada tahun 2015-2017 berikut ini menunjukkan pertumbuhan lahan yang terjadi tidak semakin bertambah melainkan menjadi minus. Ini tak terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah kepada pengaturan pemanfaatan ruang kawasan pertanian.

Tabel 3. Luas lahan pertanian di Kota Prabumulih (hektar) tahun 2015-2017

Jenis Lahan Sawah	Pertumbuhan		
	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
1. Sawah	525,00	450,00	700,00
2. Lahan Tegak/Kebun (Ha)	3745,00	2578,00	2553,00
3. Ladang/ Huma (Ha)	960,00	1112,00	1099,00
4. Lahan Sementara Tidak Diusahakan (Ha)	864,00	902,00	948,00

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Prabumulih dalam Angka 2016, 2018 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 hingga 2016 tidak terjadinya pertumbuhan yang terjadi pada jenis lahan sawah yang ada di Kota Prabumulih serta adanya penyusutan luas lahan tegak/kebun yang terjadi dari tahun 2015-2017 yaitu sekitar 1192 Ha. Dan adanya sedikit pertumbuhan pada lahan yang sementara tidak diusahakan yaitu sekitar 8,7 %. Dalam sektor pertanian, lahan merupakan

elemen yang sangat fundamental bagi para petani karena dipergunakan sebagai alat untuk bercocok tanam.

Saat ini bisnis perumahan di Kota Prabumulih sedang berkembang dengan pesat, sebab kawasan Kota Prabumulih makin penuh dan sesak sehingga pembangunan untuk perumahan dan industri lainnya makin mengarah ke pinggiran kawasan pertanian kota. Dapat kita lihat bersama pada tabel 4 bahwa pemanfaatan lahan permukiman terjadi kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 15,6%. Sehingga jika hal ini tidak diperhatikan maka sektor pertanian akan tergerus dan berubah menjadi permukiman maupun Industri lainnya.

Tabel 4. Jumlah Ijin Perubahan Penggunaan Luas Lahan Tahun 2015-2017

Luas Lahan (Ha)		Tahun		
		2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
Jenis Tanah	Sawah	525,00	450,00	700,00
	Kering	5569,00	4592,00	4600,00
Total		6094,00	5042,00	5300,00
Penggunaan Lahan	Pemukiman	5725,00	6622,00	5500,00
	Industri lainnya	541,05	697,95	76,05
Total		6266,05	7319,95	5576,05

Sumber : Prabumulih dalam Angka 2017, 2018 BPS (data diolah)

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2015 sampai 2016 tipe tanah sawah dan tanah kering mengalami penurunannya sebesar 14,2% dan 17,5% dari luas lahan tahun 2015. Dan luas tanah kering melebihi luas tanah sawah yakni sebesar 5569.00 ha, hal ini juga berkenaan dengan pemanfaatan lahan permukiman dan industri lainnya yang cukup besar melebihi jumlah luas tanah sawah dan tanah kering. Dari jumlah luas lahan sawah dan lahan kering dari tahun 2015 sampai tahun 2016 seluas 1052 ha sudah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi permukiman seluas 897 ha dan industri lainnya seluas 156,9 ha.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian tersebut dari tahun ketahun dengan pesatnya telah baralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri lainnya, meskipun lahan tersebut masih termasuk dalam kategori lahan subur. Karena itulah peran pemerintah sangatlah penting sebagai pengontrol dan pengawasan proses pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih dalam pemanfaatan ruang yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Prabumulih.

Dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah Kota Prabumulih mampu memiliki regulasi dan acuan mengenai penataan ruang wilayah dalam pengelolaan manfaat ruang yang mengarahkan pembangunan serta pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu dan dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan bagi dunia usaha sehingga dapat memberikan perlindungan fungsi ruang baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dalam studi ilmu administrasi publik terutama pada bidang kebijakan publik, untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih. Serta sebagai alat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan tinggi dalam mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau masukan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Prabumulih dan pemerintah kota maupun lembaga lain yang terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam menyediakan dan mengelola tata ruang wilayah Kota Prabumulih. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi dan perbandingan untuk semua pihak yang akan melakukan penelitian yang sama tentang rencana penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Keijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media
- Nugroho, Iwan, dan Dahuri, Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Analisisnya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ridwan, Uniarso. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa
- Subarsono. AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press
- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balirung&Co.
- Wicaksono, Satria. 2015. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui IPPT di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*

Jurnal

- AHI. 2001. *Pengaruh Faktor Organisasi Pada Efektivitas Perizinan Sebagai Alat Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Perizinan Kegiatan Industri Di Kota Kudus)*
- Andrizal. 2007. *Efektivitas Pengendalian Tata Ruang Kasus Pengendalian Pembangunan di Kota Singkawang*
- Ardhiasri, Johanita, Zainal Hidayat dan Dewi Rostyaningsih. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang (Studi Kasus Pembatasan Lahan Untuk Perumahan di Atas Perbukitan)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Pratiwi, Sagita Enggar. 2014. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Usman, Amir. 2004. *Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa Studi Kasus Ruas Jalan Patal-Pusri Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*

Internet

BPS Kota Prabumulih, <https://prabumulihkota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 9 November 2018 pukul 19.27

www.penataanruang.com diakses tanggal 8 November 2018

<https://jalurhijausepeda.blogspot.com/2017/01/skripsi-implementasi-penyediaan-ruang.html> diakses tanggal 14 Maret 2019

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Pekerjaan Umum